

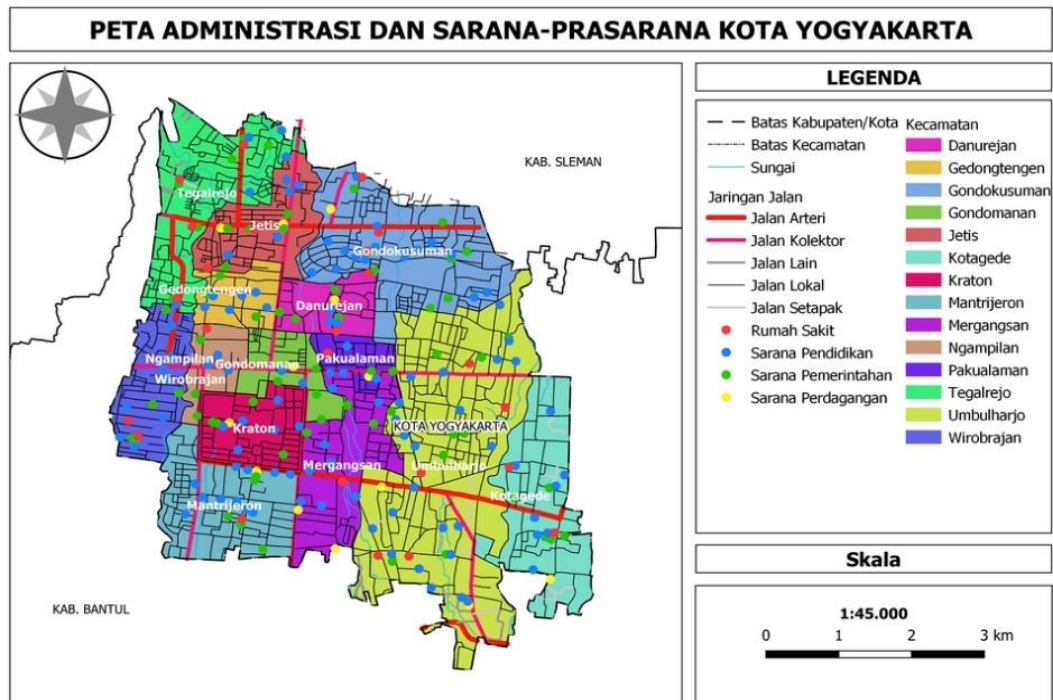
## BAB 2

### GAMBARAN UMUM KEMANTREN UMBULHARJO

#### 2.1 Gambaran Umum Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta merupakan kota yang berkedudukan sebagai ibu kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta menjadi cakupan wilayah dalam pelaksanaan Program Mas JOS yang diuraikan pada aspek geografis dan demografis wilayah.

Gambar 2.1  
Peta Wilayah Kota Yogyakarta



Sumber: Urban Rural (2024), pemetaan tematik GIS(ArcGIS, QGIS)

Gambar 2.1 diatas menggambarkan peta wilayah Kota Yogyakarta berdasarkan klasifikasi batas kemantren yang ada. Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah 3.281,91 hektar, yang mencakup sekitar 1,03% dari total luas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak bentang wilayahnya kurang lebih 7,5 km dari arah utara ke selatan dan sekitar 5,6 km dari barat ke timur. Secara geografis, kota ini berada di dataran lereng aliran Gunung Merapi dengan kondisi topografi yang relatif datar, yaitu memiliki kemiringan lahan antara 0–2% serta berada pada ketinggian rata-rata 126 meter di atas permukaan laut (mdpl). Secara administratif pada tahun 2024 Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kemantren, 45 kelurahan, 616 RW dan 2.534 RT.<sup>76</sup>

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2024 mencapai 415.605 jiwa, yang terdiri atas 202.478 jiwa laki-laki dan 213.127 jiwa perempuan. Dengan luas wilayah sebesar 32,82 km<sup>2</sup>, tingkat kepadatan penduduk pada tahun tersebut tercatat sekitar 12.664 jiwa per km<sup>2</sup>. Kepadatan ini dihitung dari jumlah penduduk per satu kilometer persegi wilayah. Jika dilihat per kecamatan, wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Ngampilan dengan 21.327 jiwa per km<sup>2</sup>, sedangkan kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Umbulharjo, yaitu sebesar 8.224 jiwa per km<sup>2</sup>.<sup>77</sup>

## **2.2 Gambaran Umum Kemantren Umbulharjo**

Kemantren Umbulharjo merupakan salah satu wilayah administratif yang sebelumnya dikenal sebagai kecamatan di Kota Yogyakarta. Kemantren Umbulharjo merupakan Organisasi Perangkat Daerah setingkat kecamatan di bawah pemerintahan Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Yogyakarta. Istilah kemantren merupakan hasil perubahan penyebutan kecamatan menjadi kemantren pada tahun 2020 yang

---

<sup>76</sup> Badan Pusat Statistika. (2025). Kota Yogyakarta dalam Angka 2025

<sup>77</sup> Ibid.

berlandaskan pada UU Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>78</sup> Berdasarkan regulasi tersebut, unit organisasi kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta yang sudah diubah nomenklturnya menjadi kemantren, secara kelembagaan dipimpin oleh seorang Mantri Pamong Praja.<sup>79</sup> Jabatan Mantri Pamong Praja memiliki kedudukan yang setara dengan Camat, yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Secara struktural, Kemantren Umbulharjo berfungsi sebagai perangkat daerah yang menerima pelimpahan sebagian wewenang dari Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah serta mengoordinasikan tugas pemerintahan di wilayah kerjanya.<sup>80</sup> Dalam menjalankan roda pemerintahan, Mantri Pamong Praja dibantu oleh seorang Sekretaris Kemantren serta beberapa Jawatan (setingkat seksi) yang mengampu urusan spesifik, meliputi Jawatan Pemerintahan, Jawatan Keamanan, Jawatan Kemakmuran Masyarakat, dan Jawatan Sosial. Pada pelaksanaan program Mas JOS, pembagian kewenangan antar jawatan ini memiliki pembagian peran fungsional pada struktur koordinasi program. Di tingkat bawahnya, struktur pemerintahan Kemantren Umbulharjo langsung membawahi 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Pandeyan, Sorosutan, Giwangan, Warungboto, Mujamuju, Semaki, dan Tahunan, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Lurah.

Gambaran umum mengenai deskripsi visual dan demografi Kemantren Umbulharjo dijelaskan dalam aspek di bawah ini.

---

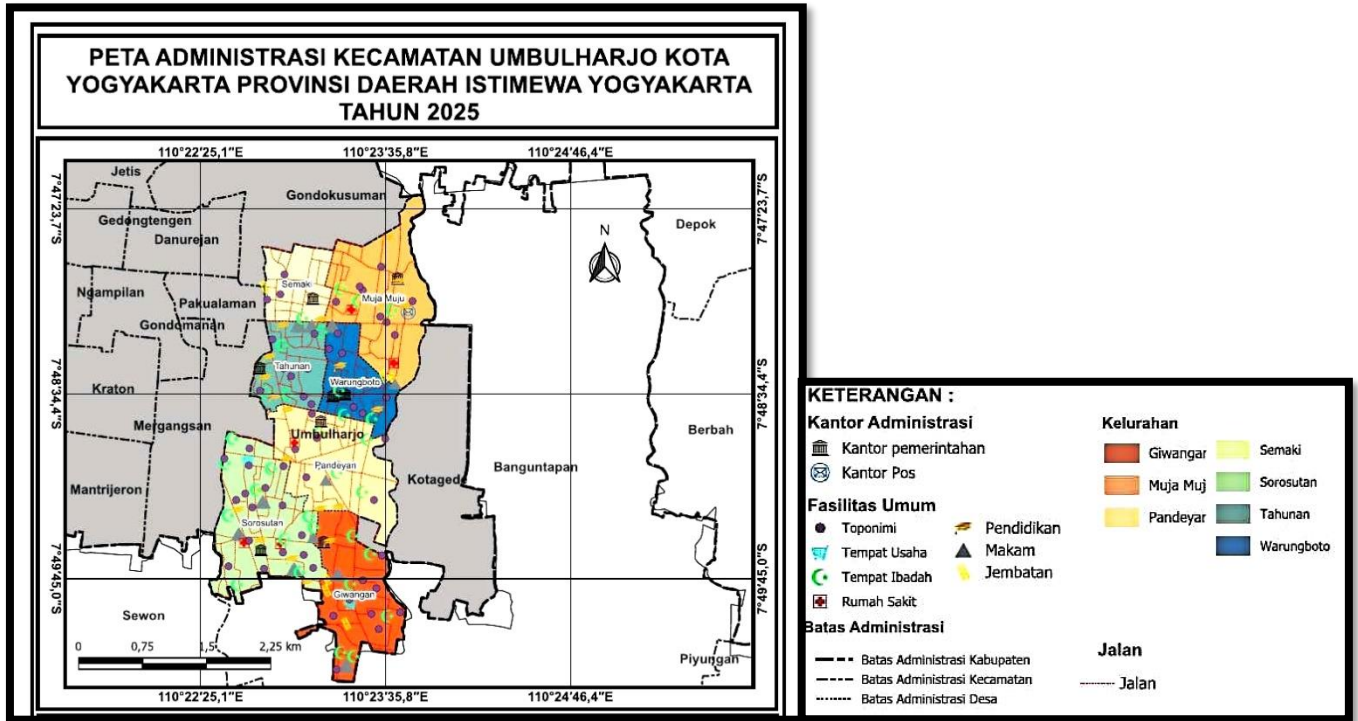
<sup>78</sup> CNN Indonesia (2019). "Kecamatan di Yogyakarta Diubah Jadi Kapanewon dan Kemantren". Nasional: politik.

<sup>79</sup> Pemerintah Kota Yogyakarta. (2019). *Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta*. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019. <https://jdih.jogjakota.go.id/>

<sup>80</sup> Pemerintah Kota Yogyakarta. (2020). *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta*. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2020.

## 2.2.1 Kondisi Geografis Kemantren Umbulharjo

Gambar 2.2  
Peta Kemantren Umbulharjo



Sumber: Anisah Hasna(2025), Peta Kecamatan Umbulharjo

Gambar 2.2 diatas merupakan peta Kemantren Umbulharjo sebagai gambaran batas wilayah dan pembagian wilayah kelurahan. Kemantren Umbulharjo menaungi tujuh kelurahan, yaitu Semaki, Mujamuju, Tahunan, Warungboto, Pandeyan, Sorosutan, dan Giwangan. Secara keseluruhan, wilayah ini terdiri atas 19 kampung, 345 Rukun Tetangga (RT), dan 87 Rukun Warga (RW).

Tabel 2.1  
Luas dan Persentase Wilayah Kelurahan di Kemantren Umbulharjo

No	Kelurahan	Luas Wilayah(km <sup>2</sup> )	Persentase(%)
1	Giwangan	1,26	15,52

No	Kelurahan	Luas Wilayah(km <sup>2</sup> )	Persentase(%)
2	Sorosutan	1,68	20,69
3	Pandeyan	1,38	16,99
4	Warungboto	0,83	10,22
5	Tahunan	0,78	9,61
6	Muja-Muju	1,53	18,84
7	Semaki	0,66	8,13
	<b>Umbulharjo</b>	<b>8,12</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS Kecamatan Umbulharjo dalam Angka, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 2.1 diketahui bahwa Kelurahan terluas di Kemantren Umbulharjo adalah Kelurahan Sorosutan, disusul dengan Kelurahan Muja-Muju. Sedangkan Kelurahan dengan luas wilayah terkecil adalah Kelurahan Semaki dengan luas wilayah sebesar 0,66 km<sup>2</sup>. Data ini menjadi pertimbangan peneliti untuk menggali data pelaksanaan program Mas JOS pada aspek yang dipengaruhi oleh luas wilayah kelurahan.

### 2.2.2 Demografi Kemantren Umbulharjo

Kemantren Umbulharjo yang merupakan kemantren terluas di Kota Yogyakarta memiliki jumlah penduduk yang besar. Berikut merupakan sebaran jumlah penduduk di tujuh kelurahan di Kemantren Umbulharjo.

Tabel 2.2  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Tiap Kelurahan

No	Kelurahan	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	Sorosutan	7.953	8.302	16.255
2	Pandeyan	6.130	6.352	12.482
3	Muja-Muju	5.548	5.820	11.368
4	Warungboto	4.575	4.850	9.425
5	Tahunan	4.509	4.714	9.223
6	Giwangan	4.076	4.211	8.287
7	Semaki	2.484	2.679	5.163
	Jumlah	35.275	36.928	72.203

Sumber: Hasil Olah Badan Pusat Statistika Kecamatan Umbulharjo dalam Angka, 2025

Dari Tabel 2.2 Kelurahan Sorosutan memiliki jumlah penduduk terbesar sebanyak 16 ribu jiwa disusul dengan Kelurahan Pandeyan sejumlah 12 ribu jiwa dan Muja-Muju 11 ribu jiwa. Walaupun memiliki jumlah penduduk yang besar, Kemantren Umbulharjo memiliki jumlah penduduk dengan rasio lebih kecil dalam perbandingan terhadap luas wilayah. Berikut ini numerasi demografi penduduk di Kemantren Umbulharjo, yang meliputi kepadatan penduduk, jumlah kepala keluarga, dan tingkat pendidikan di kemantren Umbulharjo.

Tabel 2.3  
Kepadatan Penduduk Kelurahan di Kemantren

No	Kelurahan	Kepadatan Penduduk (ribu jiwa/km <sup>2</sup> )
1	Semaki	7,82
2	Muja Muju	7,19
3	Tahunan	11,45
4	Warungboto	11,24
5	Pandeyan	8,99
6	Sorosutan	9,29
7	Giwangan	6,40
	<b>Umbulharjo</b>	<b>8,89</b>

Sumber: Hasil Olah Badan Pusat Statistika Kemantren Umbulharjo dalam angka 2025

Berikut ini adalah data dari Tabel 2.3 mengenai kepadatan penduduk di Kemantren Umbulharjo. Angka kepadatan penduduk ini menunjukkan jumlah penduduk di Umbulharjo yang diperoleh dari membagi jumlah penduduk terhadap luas wilayah dalam satuan km<sup>2</sup>. Kelurahan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kelurahan Tahunan dengan 11.450 jiwa/ km<sup>2</sup>. Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kelurahan Giwangan dengan jumlah 6.400 jiwa/ km<sup>2</sup>. Data ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi sebaran densitas penduduk di suatu wilayah dan pengaruhnya dalam penelitian.

Tabel 2.4  
Jumlah KK Kelurahan di Kemantren Umbulharjo 2025

No	Kelurahan	Jumlah Kepala Keluarga
1	Semaki	1.833
2	Muja Muju	3.903
3	Tahunan	3.202
4	Warungboto	3.247
5	Pandeyan	4.274
6	Sorosutan	5.507
7	Giwangan	2.753
	Umbulharjo	24.719

Sumber: Hasil Olah Badan Pusat Statistika  
Kemantren Umbulharjo dalam angka 2025

Tabel 2.4 memuat informasi kepala keluarga di Kemantren Umbulharjo yang memiliki jumlah total 24,7 ribu kepala keluarga, dengan Kelurahan Sorosutan sebagai jumlah kepala keluarga terbanyak yaitu 5,5 ribu. Selain sebagai gambaran demografis, tentunya hal ini menjadi salah satu determinan yang dapat digunakan dalam analisis penelitian ini.

Tabel 2.5  
Tarf Pendidikan Penduduk Kemantren Umbulharjo

No	Kelurahan	Tidak Sekolah	Belum Tamat SD	Tamat SD	SLTP	SLTA	DI/II	S1/S2/S3	Jumlah (%)
1	Giwangan	19,80	10,52	10,81	11,57	25,35	4,65	17,29	100
2	Sorosutan	18,97	9,14	9,81	10,64	26,13	5,12	20,19	100
3	Pandeyan	18,35	9,43	9,83	10,97	25,48	5,30	20,64	100
4	Warungboto	18,31	9,22	8,59	9,95	26,51	5,63	21,77	100
5	Tahunan	18,61	8,68	7,84	10,50	26,87	5,45	22,05	100
6	Muja-Muju	18,18	9,56	8,80	9,94	25,56	4,76	23,21	100
7	Semaki	18,48	9,78	8,72	11,56	27,56	5,79	18,11	100

Sumber: Hasil Olah Badan Pusat Statistika Kemantren Umbulharjo dalam Angka 2025

Deret kategori pendidikan dalam Tabel 2.5 menggambarkan sebaran tingkat pendidikan yang diakses oleh penduduk Kemantren Umbulharjo. Penduduk di sana didominasi oleh masyarakat dengan pendidikan setara SLTA dengan persentase relatif di angka di atas 25% atau seperempat dari total penduduk di tiap kelurahan. Lalu

disusul dengan pendidikan sarjana baik S1, S2, maupun S3 dengan persentase yang variatif dengan rentan 17% - 23%. Hal ini menunjukkan kesadaran belajar dan taraf pendidikan masyarakat di Kemantren Umbulharjo. Karakter ini menjadi pertimbangan penulis dalam menggambarkan efektivitas pelaksanaan Mas JOS yang dipengaruhi kualitas pendidikan di tingkat kelurahan.

### **2.2.3 Fasilitas Publik**

Keberadaan fasilitas publik yang tersebar di Kemantren Umbulharjo menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi pengelolaan sampah. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan adanya karakteristik wilayah di Kemantren Umbulharjo yang didorong oleh persebaran infrastruktur pendidikan, hunian, dan pusat perbelanjaan lokal. Sektor pendidikan tinggi didominasi oleh Kelurahan Sorosutan dan Warungboto yang secara kolektif menampung 13 Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Di wilayah Sorosutan, denyut akademik digerakkan oleh institusi besar seperti Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Kampus 4 dan 5, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST), Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta, serta Akademi Kebidanan Ummi Khasanah. Sementara itu, aktivitas pendidikan tinggi di Kelurahan Warungboto ditopang oleh UAD Kampus 2 dan Universitas Teknologi Digital Indonesia (UTDI). Sektor pendidikan ini juga diperkuat oleh keberadaan jenjang sekolah formal di seluruh area Umbulharjo yang mencakup 40 TK, 25 SD, 9 SMP, dan 18 SMA/SMK.<sup>81</sup>

Konsentrasi lembaga pendidikan tersebut secara langsung memicu pertumbuhan sektor akomodasi di sekitarnya. Permintaan infrastruktur penunjang pendidikan dari pelajar luar daerah meningkatkan densitas penyediaan hunian, khususnya rumah kos dan rumah sewa jangka panjang di sekitar Sorosutan dan Warungboto.

---

<sup>81</sup> BPS. (2024) *Kemantren Umbulharjo Dalam Angka 2025*..

Di sektor perdagangan, aktivitas berpusat pada keberadaan pasar tradisional dengan karakteristik yang berbeda di beberapa kelurahan. Kelurahan Giwangan menjadi penunjang pangan utama di bagian selatan melalui Pasar Induk Giwangan, yang beroperasi di atas lahan seluas 24.594 m<sup>2</sup> dengan aktivitas dagang dari 678 pelaku usaha sayur dan buah. Fasilitas perdagangan lainnya tersebar di Kelurahan Sorosutan melalui Pasar Sepeda Tunjungsari dengan luas tapak 1.147 m<sup>2</sup>, serta Kelurahan Semaki yang mengakomodasi kebutuhan pokok skala domestik melalui Pasar Pace seluas 90 m<sup>2</sup>.<sup>82</sup>

Keberadaan fasilitas publik diatas merepresentasikan kompleksitas ruang publik yang dikelola oleh pemerintah. Adanya fasilitas pasar, sekolah, usaha, dan kampus menggambarkan konsentrasi aktivitas masyarakat yang tinggi dan berpengaruh terhadap timbulan produksi sampah di sekitar wilayah Kemantren Umbulharjo.

### **2.3 Kondisi Pengelolaan Sampah Kota Yogyakarta**

Pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta hingga saat ini masih menjadi persoalan yang kompleks dan belum sepenuhnya terselesaikan. Tantangan tersebut semakin besar setelah penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan pada Mei 2024, yang mendorong Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menerapkan kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah secara mandiri. Aspek pendanaan menjadi salah satu problematika pengelolaan sampah di kota Yogyakarta. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai belum mampu sepenuhnya menutupi kebutuhan biaya pengelolaan sampah yang relatif besar. Oleh karena itu, dukungan dari Dana Keistimewaan (Danais) menjadi penting dalam menopang

---

<sup>82</sup> Ibid.

kebijakan desentralisasi tersebut, khususnya dalam memastikan keberlanjutan sistem pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta.<sup>83</sup>

Dari sisi operasional, Kota Yogyakarta menghasilkan sekitar 200 ton sampah setiap harinya. Namun, jumlah tersebut belum sepenuhnya dapat ditangani secara mandiri oleh pemerintah kota. Sebagian besar sampah, yakni sekitar 180 ton per hari, telah dikelola melalui beberapa fasilitas pengolahan sampah dibawah ini.

Tabel 2.6  
Fasilitas dan Kapasitas Pengolahan Sampah Kota Yogyakarta

No.	Fasilitas pengolahan sampah	Kapasitan Ton/hari
1.	TPS 3R Nitikan	60-70
2.	TPS 3R Kranon	30
3.	TPS 3R Karangmiri	15
4.	TPS 3R Sitimulyo	30
5.	Insinerator Giwangan	40
6.	Insinerator Sitimulyo	40

Sumber: Hasil Olah Portal Pemerintah DIY (2024)

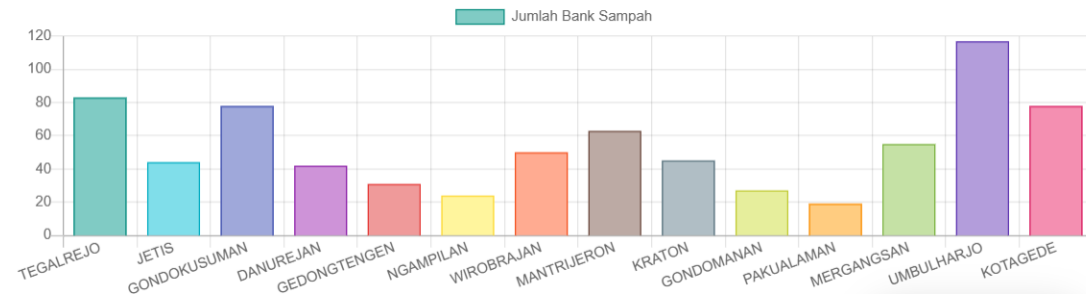
Fasilitas pengolahan sampah di Kota Yogyakarta pada Tabel 2.6 diantaranya TPS 3R Nitikan yang menangani sekitar 60-70 ton, TPS 3R Kranon sekitar 30 ton, TPS 3R Karangmiri sekitar 15 ton, dan TPS 3R Sitimulyo sekitar 30 ton sampah per hari. Selain itu, pengolahan dengan metode termal juga dilakukan di Giwangan dan Sitimulyo dengan kapasitas masing-masing sekitar 40 ton per hari. Meski demikian, masih terdapat sisa lebih dari 20 ton sampah per hari yang belum dapat ditangani, sehingga harus diserahkan kepada pihak swasta yang berada di wilayah Sleman dan

---

<sup>83</sup> Portal Pemerintah DIY. (2024). Danais Amankan Desentralisasi Penanganan Sampah Kota Yogyakarta.

Bantul.<sup>84</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas pengelolaan sampah yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu mengimbangi jumlah timbulan sampah harian.

Gambar 2.3  
Grafik Jumlah Bank Sampah Tingkat Kemantren



Sumber: *Jogja Smart Services*, Bank Sampah 2025

Bank sampah di Kota Yogyakarta juga digunakan sebagai penunjang pengelolaan sampah anorganik. Dari Gambar 2.3 diketahui Kemantren atau kecamatan dengan jumlah bank sampah terbanyak di Kota Yogyakarta adalah Kemantren Umbulharjo dengan jumlah total 116 bank sampah. Lalu di urutan kedua Kemantren Tegalrejo dengan jumlah sebanyak 83 bank sampah. Kemantren dengan jumlah bank sampah paling sedikit adalah Kemantren Pakualaman dengan jumlah 19 bank sampah. Operasional bank sampah di Kota Yogyakarta direkap berdasarkan jumlah nasabah dan omset bulanan yang dipublikasikan melalui laman maupun aplikasi JSS.

## 2.4 Program Pengelolaan Sampah Kota Yogyakarta

Sebagai upaya lanjutan dalam mengatasi permasalahan sampah, Pemerintah Kota Yogyakarta telah melaksanakan berbagai program strategis yang berfokus pada pengurangan sampah dari sumbernya serta peningkatan partisipasi masyarakat. Salah satu program utama yang digencarkan adalah gerakan *zero sampah anorganik* yang

<sup>84</sup> Portal Pemerintah DIY. (2024). Danais Amankan Desentralisasi Penanganan Sampah Kota Yogyakarta.

mulai diberlakukan sejak Januari 2023. Gerakan ini diperkuat melalui Surat Edaran Wali Kota Yogyakarta Nomor 660/6123/SE/2022 yang bertujuan untuk menekan volume sampah, khususnya sampah anorganik, yang selama ini menjadi beban di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Pelaksanaan gerakan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari perangkat daerah, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, pelaku usaha, hingga masyarakat secara luas. Seluruh elemen tersebut diwajibkan untuk melakukan pengelolaan sampah yang mencakup upaya pengurangan dan pengolahan. Program ini juga didukung dengan penguatan peran bank sampah yang jumlahnya telah mencapai 678 unit di seluruh Kota Yogyakarta. Secara nyata, upaya ini menunjukkan hasil yang cukup signifikan, di mana volume sampah harian berhasil ditekan dari sekitar 300 ton menjadi 200 ton.<sup>85</sup>

Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Yogyakarta juga menginisiasi program *Organikkan Jogja* sebagai tema lokal yang menitikberatkan pada pengelolaan sampah organik sejak dari sumbernya. Program ini menjadi wujud komitmen pemerintah dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap pengelolaan sampah, khususnya dalam memilah dan mengolah sampah organik di tingkat rumah tangga.<sup>86</sup>

Upaya tersebut kemudian diperkuat melalui program Mas JOS (Masyarakat Jogja Olah Sampah) yang dilaksanakan pada Agustus 2025 oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Forum Bank Sampah (FBS) Kota Yogyakarta. Program ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara berkala di 45 kelurahan se-Kota Yogyakarta. Program Mas JOS bertujuan untuk

---

<sup>85</sup> Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. (2023). Surat Edaran (SE) Walikota Yogyakarta Nomor 660/6123/SE/2022 Tentang Gerakan Zero Sampah Anorganik.

<sup>86</sup> Portal Berita Pemkot Yogyakarta. (2024). Organikkan Jogja Komitmen Warga Selesaikan Sampah dari Rumah.

mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis sumber, terutama di tingkat rumah tangga sebagai unit terkecil dalam sistem sosial.<sup>87</sup> Program-program tersebut diupayakan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membudayakan pengolahan sampah sejak dari sumbernya yaitu rumah tangga.

## **2.5 Program Pengelolaan Sampah di Kemantren Umbulharjo**

Kompleksitas wilayah dan permasalahan sampah di Kemantren Umbulharjo ditangani dengan berbagai metode yang bervariasi. Diantara solusi permasalahan sampah diinstruksikan oleh pemerintah Kota Yogyakarta maupun diselenggarakan berdasarkan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat. Umbulharjo yang dikoordinasi oleh mantri sudah melaksanakan berbagai program oleh Pemkot seperti Gerakan Zero Sampah Anorganik, Organikkan Jogja, Mbah Dirjo, dan yang sedang berjalan adalah Program Mas JOS. Hal tersebut merupakan bentuk dukungan OPD di wilayah untuk menyelesaikan masalah ditengah isu darurat sampah di Kota Yogyakarta.

Di sisi lain, Kemantren Umbulharjo juga menjalankan pemberdayaan pengelolaan sampah yang berbasis komunitas. Salah satunya adalah adanya fasilitas bank sampah yang sudah berjalan di masyarakat. Bank sampah sendiri adalah sistem pengelolaan sampah yang melibatkan proses pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah dengan pendekatan ekonomi. Konsep ini mengubah nilai sampah yang menjadi masalah utama di lingkungan agar menjadi sumber pendapatan bagi anggota bank sampah. Melalui Bank Sampah, masyarakat didorong untuk lebih sadar dan aktif dalam mengelola sampah secara bertanggung jawab.<sup>88</sup> Bank sampah di Kemantren Umbulharjo dikenal memiliki jumlah terbanyak dan juga unggul di Kota Yogyakarta.

---

<sup>87</sup> Dinas Lingkungan Hidup. (2025). Kota Yogyakarta Serentak "Mas JOS" (Masyarakat Jogja Olah Sampah)

<sup>88</sup> *Plastics Smart Cities*. (2024). Bank Sampah: Konsep dan Peran dalam Pengelolaan Lingkungan

Tabel 2.7  
Jumlah Bank Sampah Kelurahan di Kemantren Umbulharjo

No.	Kelurahan	Jumlah Bank Sampah
1.	Semaki	10
2.	Muja Muju	22
3.	Tahunan	25
4.	Warungboto	12
5.	Pandeyan	16
6.	Sorosutan	18
7.	Giwangan	13
Total		116

Sumber: Hasil olah data bank sampah di *Jogja Smart Services*, (2026)

Berdasarkan Tabel 2.7 diatas, diketahui bahwa Kemantren Umbulharjo memiliki jumlah total 116 bank sampah yang terdaftar pada laman resmi Pemkot Yogyakarta. Sebagian besar bank sampah tersebut sudah aktif melakukan kegiatan pengelolaan sampah yang dimonitoring melalui sistem dalam aplikasi *Jogja Smart Services*. Dan hanya ditemukan dua bank sampah yang tidak berjalan yaitu Bank Sampah Barokah di Kelurahan Tahunan dan Bank Sampah Melati Indah di Kelurahan Muja Muju. Meski demikian, bank sampah di Umbulharjo juga aktif dan berprestasi seperti Bank Sampah Jarik Lurik di Kelurahan Warungboto yang mendapatkan Juara I kategori reguler pada tahun 2021, Bank Sampah Webe-09 Kelurahan Warungboto sebagai Juara II pada 2022 dan Bank Sampah Masdarling di Kelurahan Muja Muju yang sering masuk nominasi ataupun juara pada 2023-2024.

Inovasi lain dari pengelolaan sampah di Umbulharjo adalah dengan program maggot. Jenis maggot yang digunakan adalah maggot *Black Soldier Fly (BSF)*. Inovasi ini bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke depo dengan metode yang ramah lingkungan dan memiliki nilai jual. Maggot sendiri merupakan binatang pengurai sampah, dan dapat menjadi bahan untuk pakan ternak dengan bergizi tinggi, karena mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh pertumbuhan dan perkembangan

ternak, terutama ternak jenis unggas. Selain itu, maggot baik untuk pakan ikan, seperti lele.<sup>89</sup> Pupuk organik yang dihasilkan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk konsumsi pribadi atau dijual, sehingga dapat mendatangkan manfaat ekonomi untuk masyarakat. Seperti rumah maggot yang sudah aktif yaitu pengelola Maggot *Ndalem Sawo dan Gubuk* Tani Mendungan yang keduanya berada di Kelurahan Giwangan,. Lalu juga kerjasama dengan CSR *Great and Green* yang mendorong distribusi box maggot di Ruang Terbuka Hijau Publik(RTHP) Kelurahan Warungboto, Kemantren Umbulharjo. Pengolahan sampah dengan maggot dinilai praktis melalui media kotak budidaya. Kotak berisi maggot tersebut digunakan untuk menampung sampah organik berupa sisa sayur atau buah yang dimakan oleh maggot tersebut. Di situ dari maggot bayi akan berkembang menjadi maggot dewasa.<sup>90</sup>

Selain itu juga program biopori jumbo yang sudah terpasang di beberapa titik di Kemantren Umbulharjo. Biopori jumbo dikhususkan untuk sampah organik kering yaitu daun yang berasal dari RTHP dan hasil pangkasan dari pemukiman warga, kemudian dimasukkan ke dalam biopori untuk diuraikan secara alami oleh mikroorganisme tanah. Proses ini menghasilkan kompos yang bermanfaat bagi kesuburan tanah.<sup>91</sup> Biopori jumbo di Kemantren Umbulharjo difokuskan di seputar RTHP seperti di Kelurahan Warungboto, Sorosutan, Giwangan dan di beberapa titik lain. Program ini sekaligus bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang harus diangkut ke tempat pembuangan akhir.

Metode pengelolaan sampah yang juga berjalan di Umbulharjo adalah metode LOSIDA yang merupakan kependekan dari Lodong Sisa Dapur. LOSIDA adalah sistem pengelolaan sampah organik yang berfokus pada pemanfaatan limbah dapur

---

1.1 <sup>89</sup> Handa, Abdulah. (2023). Rumah Maggot, Solusi Sampah Anorganik. Radio Republik Indonesia

<sup>90</sup> Ria, Stefani Yulindiriani. (2025). Kemantren Umulharjo Kelola Sampah Organik dengan Maggot. Harian Jogja

<sup>91</sup> DLH Kota Yogyakarta. (2026). Biopori Jumbo sebagai Solusi Inovatif Pengelolaan Sampah Organik di Kota Yogyakarta.

sebagai bahan kompos melalui media berupa tabung paralon, bekas tong, ember bekas, galon atau wadah tertutup lainnya yang mudah dilakukan dalam skala rumah tangga. Metode ini merupakan program unggulan salah satunya di Kelurahan Muja Muju, dari 12 RW sudah tersebar sebanyak 678 keluarga yang menggunakan LOSIDA. Kesuksesan tersebut juga merupakan hasil dari gerakan oleh Forum Bank Sampah(FBS) yang mensosialisasikan metode ini untuk memberdayakan pengelolaan sampah organik maupun anorganik.<sup>92</sup> Dimana keunggulan dari metode ini adalah untuk mengolah sampah sejak dari rumah sekaligus mengurangi jumlah sampah organik yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) maupun depo sampah, serta menghasilkan pupuk kompos berkualitas tinggi yang bisa dimanfaatkan untuk tanaman.<sup>93</sup>

## 2.6 Program Mas JOS

Program Mas JOS adalah singkatan dari Masyarakat Jogja Olah Sampah yang menyasar masyarakat untuk mengurangi volume timbulan sampah yang disetorkan ke depo-depo sampah sejak dari rumah. Program Mas JOS bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan melalui edukasi dan partisipasi aktif dari sumbernya, yaitu masyarakat dalam mengolah sampah anorganik di bank sampah dan sampah organik di rumah.<sup>94</sup>

Adapun himbauan dalam program Mas JOS tertuang dalam poin-poin berdasarkan SE Walikota Kota Yogyakarta Nomor 100.34/2783 tahun 2025,

---

<sup>92</sup> Yulianita, Wulan. (2025). FBS Muja Muju Gerakkan Seribu Nasabah Bank Sampah. Radio Republik Indonesia

<sup>93</sup> Unisa. (2024). Losida, Alternatif Tangani Sampah dan Hadapi Musim Hujan Tanpa Bencana

<sup>94</sup> Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. (2025). Lewat MAS JOS Setiap Rumah Tangga Harus Kelola Sampah. Diakses melalui <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/42232#:~:text=Pihaknya%20menegaskan%20setiap%20unit%20rumah.ke%20bank%20sampah%20maupun%20pengepul>. Pada 27 Agustus 2025 pukul 04.20 WIB.

masyarakat dan pemangku kepentingan diinstruksikan untuk melaksanakan lima langkah Mas JOS, yaitu:

1. Pilah sampah sesuai jenis; dengan memilah sampah dari sumber sampah sesuai dengan jenisnya yaitu sampah organik dan sampah anorganik dengan lebih detail untuk memaksimalkan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali;
2. Sampah anorganik ke bank sampah; sampah anorganik yang telah dipilah secara detail dan memiliki nilai ekonomis disalurkan kepada Bank Sampah Unit yang tersebar di setiap RW;
3. Olah sampah organik; sampah organik diolah menggunakan berbagai metode komposting atau disalurkan kepada mitra pengolah sampah organik;
4. Habiskan makanan; mengurangi adanya sampah makanan atau *food waste* dengan bijak dalam mempersiapkan kebutuhan dan konsumsi pangan;
5. Gunakan wadah berulang; menghindari timbulan sampah baru dengan menggunakan wadah yang dapat digunakan secara berulang

Dalam rangka mendukung keberhasilan penyebaran informasi dan pelaksanaan Program Mas JOS, Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan pembagian peran yang terstruktur dalam SE Walikota Kota Yogyakarta Nomor 100.34/2783 tahun 2025 pada berbagai tingkat kelembagaan. Program ini menekankan adanya kolaborasi lintas pihak yang melibatkan instansi pemerintah, komunitas tim kreatif, serta unsur masyarakat di tingkat kelurahan. Adapun pembagian tugas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta berperan sebagai koordinator utama dalam penyampaian informasi serta pengoordinasian pelaksanaan Program Mas JOS. Dalam menjalankan fungsi tersebut, DLH bekerja sama dengan berbagai pihak, antara lain Forum Bank Sampah Kota, SHIND Jogja, Mataram *Content Creator Community*, serta Tim Penggerak PKK (TP PKK) Kota Yogyakarta.

### 2. Mantri Pamong Praja (MPP)

Mantri Pamong Praja memiliki tanggung jawab dalam memastikan implementasi Program Mas JOS berjalan secara efektif di wilayah kemandren masing-masing. Peran tersebut mencakup kegiatan koordinasi, supervisi, serta pemantauan pelaksanaan program di tingkat wilayah. Selain itu, Mantri Pamong Praja juga bertugas menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang kemudian disampaikan kepada Wali Kota Yogyakarta melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

### 3. Lurah

Lurah memiliki peran strategis sebagai pelaksana teknis utama dalam pelaksanaan Program Mas JOS di tingkat kelurahan. Tanggung jawab lurah mencakup pelaksanaan lima langkah Mas JOS di tingkat RT, RW, kampung, hingga kelurahan. Dalam menjalankan tugas tersebut, lurah melakukan koordinasi dengan Forum Bank Sampah Kelurahan, PKK Kelurahan, serta LPMK melalui pembentukan Kader Mas JOS. Kader ini berasal dari unsur pengurus RW, pengurus bank sampah unit, dan pengurus PKK.

Lurah bersama para kader memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi, monitoring, serta pembinaan terhadap pelaksanaan program di masyarakat, termasuk kepada pelaku usaha seperti pedagang kaki lima, minimarket, hotel, dan rumah kos di wilayahnya masing-masing. Selain itu, lurah juga berperan dalam membantu pengawasan terhadap transporter atau penggrobak sampah yang beroperasi di lingkungan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Lurah juga bekerja sama dengan unsur keamanan wilayah seperti Bhabinkamtibmas dan Babinsa setempat.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Se Walikota Nomor 100.3.4/2783 Tahun 2025 tentang Mas JOS